

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**IMPLEMENTATION REPORT
GOOD CORPORATE GOVERNANCE**

2016

PT.BPR DANA MULTI GUNA

Kantor Pusat : Jl.KH Dewantara No.63 Cikarang Utara Kab. Bekasi 17530

Telp : (021) 890 1415, 890 2691, 9911 2481, 8076 7977 , 9865 1003

Fax : (021) 8910 8168, 8911 5922

Kantor Kas : Ruko Permata Gardenia Blok H No.37

Jl.Irigasi Raya – Kota Jababeka -Kab.Bekasi

Telp : (021) 8984 2032, 8983 2480, 9911 2480

Fax : (021) 8983 2480

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

IMPLEMENTATION REPORT GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT.BPR Dana Multi Guna Untuk Posisi Tahun 2016

Laporan ini di susun berdasarkan Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, sebagai penilaian penerapan Tata Kelola di PT.BPR Dana Multi Guna selama tahun 2016

Cikarang, 17 April 2017

ttd

Riwandari Juniasti
Direktur Utama

ttd

Muhamad Alwin
Direktur

Menyetujui

ttd

Drs . Soenarko
Komisaris Utama

ttd

Goetit Sri Sulasmini
Komisaris

ttd

Darheni Cahya Novianti
Komisaris

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT.BPR DANA MULTI GUNA

I. PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna

Menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT.BPR Dana Multi Guna ditujukan antara lain untuk :

- a. Mendukung visi PT.BPR Dana Multi Guna, yaitu menjadi Bank Perkreditan Rakyat yang tumbuh dengan sehat, aman, terpercaya dan bermanfaat.
- b. Mendukung Misi PT.BPR Dana Multi Guna, yaitu :
 - * Memberikan pelayanan jasa keuangan yang profesional dengan menyediakan produk jasa yang baik, dengan harga yang wajar, kejujuran yang penuh, integritas, beretika disegala aspek bisnis.
 - * Membangun sebuah lingkungan kerja yang aman dan memberikan pemenuhan serta kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagi seluruh karyawan.
 - * Menjadi warga dunia perbankan Indonesia yang baik, selaras dengan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.
 - * Memberikan hasil terbaik dan bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan (stakeholder)
 - * Memberikan manfaat dan nilai tambah bagi para pemegang saham (shareholders) dan para pemangku kepentingan (stakeholders)
 - * Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (sustainable)

2. Referensi

Penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna, dilakukan dengan mengacu :

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

3. Pernyataan komitmen Penerapan Tata Kelola

Penerapan Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap PT.BPR Dana Multi Guna. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) diharapkan PT.BPR Dana Multi Guna dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT.BPR Dana Multi Guna berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam tata kelola perusahaan.

4. Struktur Tata Kelola

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ / unit kerja di PT.BPR Dana Multi Guna telah mencerminkan adanya penerapan prinsip *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik.

Struktur Tata Kelola PT.BPR Dana Multi Guna, terdiri dari :

- 1). Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
- 2). Dewan Komisaris
- 3). Dewan Direksi
- 4). Unit – Unit Kerja APU-PPT dan Audit Internal.

Struktur tata kelola perusahaan tersebut diatas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, wewenang serta fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Hasil GCG Self Assesment

Pada tahun 2016, PT.BPR Dana Multi Guna melakukan penilaian sendiri (self assesment) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat. Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek Governance yaitu :

- 1). Governance structure , Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR agar penerapan tata kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan stakeholders BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja / unit kerja/ pegawai terkait BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur , sistem informasi manajemen, serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

- 2). Governance Process, Efektivitas proses penerapan tata kelola BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR.
- 3). Governance Outcome, hasil penerapan Tata Kelola BPR

Adapun 3 (tiga) aspek Governance tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite.
- d. Penanganan benturan kepentingan.
- e. Penerapan fungsi kepatuhan.
- f. Penerapan fungsi audit intern.
- g. Penerapan fungsi audit ekstern.
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- i. Batas Maksimum Pemberian Kredit
- j. Rencana strategis BPR
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Hasil Penilaian sendiri (Self Assesment) pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) pada Tahun 2016 dikategorikan kedalam **“Peringkat 2” (“Baik”)**. Manajemen PT.BPR Dana Multi Guna telah melakukan penerapan Good Corporate Governance yang secara umum Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan / penerapan prinsip GCG yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Good Corporate Governance, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen PT.BPR Dana Multi Guna.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (self assesment) terhadap aspek Governance Struktural, Governance Process dan Governance Outcome pada masing-masing faktor Penilaian Penerapan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut :

NO.	FAKTOR PENILAIAN	SKOR 1-5	BOBOT	SKOR TERBOBOT
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi 1.1. Governance Structure 1.2. Governance Process 1.3. Governance Outcome	2,02 1,83 2,25 2,00	20% 50% 40% 10%	0,40 0,92 0,90 0,20
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 2.1. Governance Structure 2.2. Governance Process 2.3. Governance Outcome	2,42 2,44 2,50 2,00	15% 50% 40% 10%	0,36 1,22 1,00 0,20
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite 3.1. Governance Structure 3.2. Governance Process 3.3. Governance Outcome	0,00 0,00 0,00 0,00	0% 0% 0% 0%	0,00 0,00 0,00 0,00

4	Penanganan Benturan Kepentingan 4.1. Governance Structure 4.2. Governance Process 4.3. Governance Outcome	3,00 3,00 3,00 3,00	10% 50% 40% 10%	0,30 1,50 1,20 0,30
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan 5.1. Governance Structure 5.2. Governance Process 5.3. Governance Outcome	3,67 3,40 4,00 3,67	10.00% 50% 40% 10%	0,37 1,70 1,60 0,37
6	Penerapan Fungsi Audit Intern 6.1. Governance Structure 6.2. Governance Process 6.3. Governance Outcome	2,83 2,60 3,25 2,25	10.00% 50% 40% 10%	0,28 1,30 1,30 0,23
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern 7.1. Governance Structure 7.2. Governance Process 7.3. Governance Outcome	2,20 2,00 2,50 2,00	2,50% 50% 40% 10%	0,06 1,00 1,00 0,20
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk SPI 8.1. Governance Structure 8.2. Governance Process 8.3. Governance Outcome	1,20 0,00 3,00 0,00	10% 50% 40% 10%	0,12 0,00 1,20 0,00
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit 9.1. Governance Structure 9.2. Governance Process 9.3. Governance Outcome	2,60 3,00 2,50 1,00	7,50% 50% 40% 10%	0,20 1,50 1,00 0,10
10	Rencana Strategi BPR 10.1. Governance Structure 10.2. Governance Process 10.3. Governance Outcome	3,00 3,00 3,00 3,00	7,50 50% 40% 10%	0,20 1,50 1,20 0,30
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan 11.1. Governance Structure 11.2. Governance Process 11.3. Governance Outcome	2,35 3,00 1,75 1,50	7,5% 50% 40% 10%	0,18 1,5 0,70 0,15
	Total Skor : 2,49 Predikat Komposit : Baik			

6. Laporan Pelaksanaan GCG

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT.BPR Dana Multi Guna tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 8/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT.BPR Dana Multi Guna, sekurang-kurangnya terdiri dari Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan

Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Laporan penilaian sendiri (self assesment) pelaksanaan Good Corporate Governance sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan BPR dalam 1(satu) Tahun terakhir.

Berikut ini adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola PT.BPR Dana Multi Guna selama tahun 2016 :

- A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- B. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawan Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham BPR.
- F. Kepemilikan saham Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/ atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR.
- H. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- I. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- K. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)
- L. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR.
- M. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
- N. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik baik nominal maupun penerima dana.
- O. Hasil Penilaian (Self Assesment)

II. PENERAPAN TATA KELOLA PT.BPR DANA MULTI GUNA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maka Direksi Bank diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jumlah anggota Direksi PT.BPR Dana Multi Guna adalah 2 (dua) orang, Jumlah tersebut tidak melebihi anggota Dewan Komisaris dan hal ini telah memenuhi ketentuan OJK. Setiap anggota Direksi BPR DMG memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Pengangkatan semua anggota Direksi BPR DMG telah disetujui oleh BI/OJK dan masing-masing anggota telah dinyatakan lulus tes kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) oleh BI/OJK.

Dalam menjalankan tugasnya direksi tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab direksi beralih kepada pihak lain tersebut.

Susunan Direksi BPR DMG per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No	Nama Direksi Jabatan	Tanggal RUPS1)	Tanggal Efektif	Periode Penugasaan	Domisili
1	Riwandari Juniasti Direktur Utama	Akta Risalah Rapat No.8 / 15 Jan 2013	18 Jan 2013	18 Jan 2013 s/d 18 Jan 2018	Jakarta
2	Muhamad Alwin Direktur	Akta Risalah Rapat No.8 / 15 Jan 2013	18 Jan 2013	18 Jan 2013 s/d 18 Jan 2018	Bekasi

Profil Dewan Direksi PT.BPR Dana Multi Guna Tahun 2016

Riwandari Juniasti Direktur Utama	Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Dunia Usaha Program Studi Akuntansi, IKIP Jakarta tahun 1991, dan telah menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Gunadarma. Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna tahun 1996 dari mempersiapkan pendirian sampai beroperasinya PT. BPR Dana Multi Guna, diangkat menjadi Direktur Utama pada tahun 2002 sampai sekarang, dan telah lulus Sertifikasi Profesi Direktur BPR tahun 2005. Saat ini Telah mengikuti penyegaran Sertifikasi profesi Direksi , dibulan Desember 2011, dan terakhir di bulan April 2016. Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 21 Desember 2021.
Muhamad Alwin Direktur	Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi di STIE Mulya Pratama, Bekasi pada tahun 2004, dan telah menyelesaikan S2 ditahun 2014. Memulai karirnya di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 1999 dibagian Administrasi , kemudian diangkat menjadi Kepala Bagian Kredit dan Marketing, diangkat menjadi Direktur pada tahun 2002 sampai dengan sekarang, dan telah lulus Sertifikasi Profesi Direktur BPR pada tahun 2007. Telah mengikuti penyegaran Sertifikasi Profesi Direksi , dibulan April 2013. Sertifikat kompetensi berakhir 17 Juni 2018

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 - 1) Fungsi audit intern;
 - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
 - 3) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
 - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
 - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Peningkatan Kompetensi

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Riwandari Juniasti Direktur Utama	1. Capacity Building, Leadership & Rafting	05 Februari 2016	BPR DMG bekerjasama dengan Executive Adventure Outbond Malang.
	2. Penyegaran dan Survailen Sertifikasi Kompetensi	21 April 2016 s/d 23 April 2016	LPP Perbarindo Sumatra Barat
	3. Seminar Nasional dan Rakerda DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya “ Dampak penerapan GCG dan Manajemen Risiko	14 April 2016 s/d 15 April 2016	DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya bekerja sama dengan Media BPR

	bagi industri BPR/BPRS”		
	4. Seminar Nasional dan Rakernas Perbarindo “Industri BPR/S sebagai Pilar Ekonomi Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat”	26 Oktober 2016 s/d 27 Oktober 2016	DPD Perbarindo DKI Jaya dan sekitarnya
	5. Workshop Manajemen Risiko	15 September 2016 s/d 16 September 2016	DPK Perbarindo Komisariat Bekasi Timur
	6. Digital Marketing BPR	17 Desember 2016	In House Training BPR DMG
Muhamad Alwin Direktur	1. Capacity Building, Leadership & Rafting	05 Februari 2016	BPR DMG bekerjasama dengan Executive Adventure Outbond Malang.
	2. Kebijakan Pertanahan terbaru dan pelaksanaan lelang barang jaminan (Kredit Macet) dalam Akta Hak Tanggungan di Indonesia	21/04/06	Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
	3. Menganalisis karakter calon nasabah dengan pendekatan tehnik “Face Abalysys” dalam pengambilan keputusan pencairan kredit	13 Mei 2016	Professional Coach BPR dan LKM
	4. Penerapan Tata Kelola BPR	03 Juni 2016 s/d 04 Juni 2016	ZPRO Consulting
	5. Become Success Trainer	01 Oktober 2016	Bisnispartner.com
	6. Kupas tuntas peralihan hak atas tanah dan satuan rumah susun berkaitan dengan PP Nomor 24 Tahun 2016 & Implikasi perpajakan	12 Oktober 2016	Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
	7. How to set goals, target, & Budget, Design Winning Marketing Plans and Guarantee Successful Implementation	28 Oktober 2016	Academia Education dan Training
	8. Pelatihan Rencana Bisnis BPR	16 Desember 2016	DPK Perbarindo Komisariat Bekasi Timur
	9. Digital Marketing BPR	17 Desember 2016	In House Training BPR DMG

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, maka Dewan Komisaris Bank diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT.BPR Dana Multi Guna berjumlah 3 (tiga) Orang diantaranya adalah 1 (satu) orang Komisaris Utama Setiap anggota Dewan Komisaris BPR DMG memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik. Pengangkatan semua anggota Direksi BPR DMG telah disetujui oleh BI/OJK .

Jumlah anggota Dewan Komisaris belum memenuhi ketentuan POJK Tata Kelola No.4/POJK.03/2015 pasal 4 (2) yaitu BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000. 000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris tidak diperkenankan untuk memberikan kuasa secara penuh kepada pihak lain sehingga seluruh tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris beralih kepada pihak lain tersebut.

Susunan Dewan Komisaris BPR DMG per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

No	Nama Dewan Komisaris Jabatan	Tanggal RUPS	Tanggal Efektif	Periode Penugasaan	Domisili
1	Drs.Soenarko Komisaris Utama	Akta Risalah Rapat No.8 / 15 Jan 2013	15 Jan 2013	15 Jan 2013 s/d 15 Jan 2018	Jakarta
2	Goetit Sri Sulasmini Komisaris	Akta Risalah Rapat No.8 / 15 Jan 2013	15 Jan 2013	15 Jan 2013 s/d 15 Jan 2018	Jakarta
3	Darheni Cahya Noviyanti Komisaris	Akta Risalah Rapat No.8 / 15 Jan 2013	15 Jan 2013	15 Jan 2013 s/d 15 Jan 2018	Jakarta

Profil Dewan Komisaris PT.BPR Dana Multi Guna Tahun 2016

Drs.H.Soenarko Komisaris Utama	Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan Ekonomi di Universitas Gajah Mada (UGM) tahun 1968, melalui karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada Biro Organisasi Tata Kerja dan Pendidikan (Organik) pada Sekretariat Jendral Departemen Keuangan Terhitung mulai tanggal 01 januari 1972, pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pajak Salatiga pada tahun 1989 dan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kramatjati pada tahun 1995 dan pada tanggal 01 Maret 1996 memasuki masa pensiun, pada tahun 2002 diangkat sebagai Komisaris Utama sampai saat ini.
Goetit Sri Sulasmini Komisaris	Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda Fakultas Hukum Akademi Administrasi Niaga Negara, memulai karirnya sebagai sekretaris Direksi di Departement Store Sarinah, pada Tahun 2002

	diangkat sebagai Komisaris sampai saat ini.
Darheni Cahya N Komisaris	Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan Sarjana di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi di Universitas Trisakti, Jakarta. Memulai karir di PT. BPR Dana Multi Guna pada tahun 2011 dibagian Marketing, kemudian diangkat menjadi Kepala Kantor Kas, pada tahun 2013 diangkat sebagai komisaris sampai saat ini setelah lulus sertifikasi direksi tahun 2010 dan lulus <i>fit and proper test</i> dibulan Desember 2012. Saat ini telah mengikuti penyegaran Sertifikasi profesi Direksi , dibulan November 2014, dan terakhir dibulan Januari 2015, Sertifikat Kompetensi berakhir tanggal 19 Mei 2020.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Anggota Dewan Komisaris Selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama Jabatan	Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Darheni Cahya N Komisaris	1. Audit Intern BPR	23 – 24 Sept 2016	Zpro Consulting DPD Perbarindo DKI Jaya

	2. Penyusunan Rencana Bisnis BPR	10 Nop 2016	Perbarindo - Depok
	3. Digital Marketing BPR	17 Des 2016	In House Training BPR DMG

C. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS PEJABAT

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif, dengan susunan sebagai berikut:

Nama Pejabat Eksekutif	Jabatan	Masa Jabatan
Edwin yunarinda Satyagraha	Kepala Kantor Kas	2013 – Sekarang
Nurjanah	Audit Internal	2014 – Sekarang

C.1. Kepala Kantor Kas

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepala Kantor Kas

- a. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan operasional Teller, Customer Service dan bagian Umum di kantor kas
- b. Memeriksa keabsahan dan transaksi di kantor kas.
- c. Memperhitungkan kebutuhan dan uang kas setiap hari untuk keperluan kantor kas.
- d. Bertanggung jawab atas berlangsungnya kegiatan operasional kantor kas.
- e. Bertanggung jawab atas jalannya program untuk kegiatan operasional kantor kas.
- f. Peka terhadap pasar, dan kreatif memberikan ide produk baru yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- g. Menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direksi

C.2. Fungsi Audit Intern

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan

Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham	
	BPR Dana Multi Guna	Perusahaan Lain
Riwandari Juniasti	Rp.1.311.000.000,00 (65,55%)	nihil
Muhamad Alwin	nihil	nihil

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Nama Anggota Direksi	Keterkaitan	Hubungan Keuangan / Keluarga	
		Hubungan Keluarga	Hubungan Keuangan
Riwandari Juniasti	Direksi lainnya	Tidak ada	Tidak ada
	Dewan Komisaris	Ada / Tidak semenda	Tidak ada
	Pemegang saham	Ada / Tidak semenda	Tidak ada
Muhamad Alwin	Direksi lainnya	Tidak ada	Tidak ada
	Dewan Komisaris	Tidak ada	Tidak ada
	Pemegang saham	Tidak ada	Tidak ada

F. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	BPR Dana Multi Guna	BPR Lain	Perusahaan Lain
Drs.H.Soenarko	Rp.250.000.000,00 (12,50%)	nihil	nihil
Ny.Goetit Sri Sulasmini	Rp.39.000.000,00 (1,95%)	nihil	nihil
Darheni Cahya Noviyanti	nihil	nihil	nihil

G. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Nama Anggota Dewan Komisaris	Keterkaitan	Hubungan Keuangan / Keluarga	
		Hubungan Keluarga	Hubungan Keuangan
Drs.H.Soenarko	Dewan Komisaris lainnya	Ada / Tidak semenda	Tidak ada
	Dewan Direksi	Ada / Tidak semenda	Tidak ada
	Pemegang saham	Ada / Tidak semenda	Tidak ada
Ny.Goetit Sri Sulasmini	Dewan Komisaris lainnya	Ada / Tidak semenda	Tidak ada
	Dewan Direksi	Ada / Tidak semenda	Tidak ada

	Pemegang saham	Ada / Tidak semenda	Tidak ada
Darheni Cahya N	Dewan Komisaris lainnya	Ada / Tidak semenda	Tidak ada
	Dewan Direksi	Ada / Tidak semenda	Tidak ada
	Pemegang saham	Ada / Tidak semenda	Tidak ada

H. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2016.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp.266.066.396,00	Rp.497.404.592,00
Tunjangan	Rp.114.000.000,00	Rp.102.000.000,00
Tantiem	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain transportasi	-	Rp.41.941.400,00

I. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 3,7 X
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,5 X
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 2,2 X
- d) rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah 2,1 X
- e) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,7 x

J. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Frekuensi Rapat Dewan Direksi selama tahun 2016 terdiri dari 18 kali Rapat

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Prosentase Kehadiran
Drs.H.Soenarko	18	18	100.00%
Ny.Goetit Sri Sulasmini	18	18	100.00%
Darheni Cahya Noviyanti	18	18	100.00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh								
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap		
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		nihil		nihil	
Dalam proses penyelesaian internal BPR	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil	

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	1	-
Total	1	-

Permasalahan hukum yang dihadapi sedang dalam proses penyelesaian.

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
1	Muhamad Alwin Direktur	Riwandari Juniasti Direktur Utama	Kredit	200	No.0030000436

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA

- Selama tahun 2016, tidak ada pemberian dana untuk kegiatan sosial yang khusus pada pihak-pihak tertentu dengan nilai yang signifikan, namun hanya untuk kepada lingkungan kemasyarakatan saja.
- Selama tahun 2016. Tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik kepada pihak-pihak tertentu.

O. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)
(terlampir)

